



## Peran Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Literasi Pengelolaan Keuangan Dalam Mencegah Fraud Pada Koperasi Di Jakarta Utara

Fangela Myas Sari<sup>1\*</sup>, Sunarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Ilmu Sosial, Universitas 27 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Universitas Stikubank, Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: April 01, 2026  
Revised: April 22, 2026  
Available online: April 28, 2026

### KEYWORDS

Internal Control System, Accounting Information System, Financial Literacy, Fraud Prevention, Cooperative.

### CORRESPONDENCE

E-mail: [fangelamyassari@gmail.com](mailto:fangelamyassari@gmail.com)

### A B S T R A C T

*This study examines the role of Internal Control Systems (ICS), Accounting Information Systems (AIS), and financial management literacy in preventing fraudulent practices within cooperatives in North Jakarta. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis involving several active cooperatives. The findings reveal that consistent implementation of internal control mechanisms, particularly functional segregation and layered authorization procedures, plays a crucial role in reducing opportunities for fraud. Furthermore, the adoption of digital-based accounting information systems enhances transparency by providing reliable audit trails, thereby limiting the potential for data manipulation. In addition, the financial management literacy of cooperative administrators functions as an early warning mechanism in identifying irregular financial activities. Overall, the study highlights that the integration of robust control systems, effective information technology, and competent human resources is essential for establishing a comprehensive fraud prevention framework within cooperative organizations.*

### PENDAHULUAN

Aktivitas pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan modern, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dalam konteks koperasi, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pengurus dalam mengambil keputusan yang rasional, transparan, dan bertanggung jawab. Literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta menjaga keberlangsungan organisasi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016).

Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masih belum optimal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada kategori menengah, sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kesalahan pengelolaan dan risiko kecurangan (fraud).

Dalam praktiknya, koperasi sering menghadapi kendala dalam kepatuhan administratif, seperti pencatatan transaksi yang tidak akurat, penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022), fraud merupakan tindakan penipuan atau penyalahgunaan aset yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain.

Laporan ACFE juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fraud di berbagai organisasi.

Selain itu, penelitian oleh Anwar Nasution (2018) menyatakan bahwa rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian I Made Gde Suardana (2020) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kepatuhan administratif dalam organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan literasi keuangan serta penguatan kepatuhan administratif, salah satunya melalui edukasi dan pelatihan pengelolaan keuangan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisir risiko fraud dalam koperasi.

Fraud di negara Indonesia ini masih sering terjadi di organisasi sektor publik dan swasta. (ACFE, 2016) mendefinisikan penipuan sebagai "penyajian yang keliru atas kebenaran atau menyembunyikan fakta material untuk mendorong orang lain untuk bertindak demi kerugiannya". Untuk mengurangi kecurangan harus ada sistem kendali yaitu berupa pengendalian internal pembangunan yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip yang efisien dan efektif dalam langkah demokrasi dan bisa menghindari salah penyajian pengalokasian dana dan investasi untuk mewujudkan adanya pencegahan korupsi di pemerintahan secara politik maupun administrasi pemerintahan (fangela myas Sari, 2022)

Setiap tahun masih banyaknya bansos dari pemerintah dan bisa di minimalisir untuk menghindari kecurangan mulai dari mencegah dan mendeteksi bila adanya fraud. Berdasarkan kebijakan pemerintah seperti itu perekonomian di Indonesia semakin hari semakin menurun tingkat prosentasenya dikarenakan daya beli masyarakat rendah karena mematuhi keputusan atau aturan dari pemerintah yaitu di rumah saja (Myas et al., 2025)

Temuan dari Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa laporan fraud yang terungkap cenderung hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, terutama pada organisasi kecil yang memiliki keterbatasan sistem pengendalian internal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Vaswani (1997) yang menyatakan bahwa banyak kasus fraud tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan kepatuhan administratif menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan mencegah terjadinya fraud.

Literasi pengelolaan keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta mengambil keputusan keuangan yang tepat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan perpaduan antara pemahaman, keterampilan, dan keyakinan individu yang secara simultan membentuk sikap serta perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan.

Dalam konteks koperasi, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan uang saku, tetapi juga kemampuan mengelola dana organisasi, menyusun anggaran kegiatan, dan melakukan evaluasi keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan instrumen penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan SIA yang memadai memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih akurat, tepat waktu, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun manipulasi data. (Priatiningsih dan Sari, 2022)

Efektivitas pengendalian internal ditentukan berdasarkan seberapa baik tiga tujuan pengendalian intern dalam rangka dipenuhi oleh perusahaan, yaitu; pertama, efisiensi dan efektivitas kegiatan, kedua, keandalan dan ketepatan waktu informasi keuangan dan manajemen, dan terakhir, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hafizah et al., 2019)

Menurut (Moeller, 2012) Sistem Pengendalian Internal dipahami sebagai rangkaian proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, serta seluruh personel organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas sistem ini sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prosedur serta komitmen sumber daya manusia dalam menjalankannya.

Pemanfaatan teknologi informasi mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen – dokumen desa secara keseluruhan (Nursin et al., 2022). Fraud dapat dipahami sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu yang berimplikasi pada kerugian pihak

lain. Association of Certified Fraud Examiners mendefinisikan fraud sebagai bentuk penyajian informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan fakta material yang mendorong pihak lain mengambil keputusan yang merugikan dirinya.

Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey menjelaskan bahwa terjadinya fraud dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam praktik organisasi, peluang melakukan fraud seringkali muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya pemahaman pengelolaan keuangan.

Di semua lingkungan, kesempatan melakukan fraud sering muncul akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi keuangan koperasi.

Upaya pencegahan fraud memerlukan dukungan sistem pengendalian internal yang diterapkan secara optimal, baik dari aspek struktural maupun sumber daya pendukung lainnya, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor krusial dalam menganalisis, mendeteksi, dan mencegah potensi terjadinya kecurangan sejak dini. (F. M. Sari, 2022)

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pengurus koperasi dalam mengelola keuangan organisasi?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan koperasi?
3. Bagaimana peran literasi keuangan dan kepatuhan administratif dalam mencegah terjadinya fraud pada koperasi?

## TELAAH PUSTAKA

### Landasan Teori (*Grand Theory*)

#### 1. *Fraud Triangle Theory* (Teori Segitiga Kecurangan)

Teori ini menjelaskan tiga faktor utama mengapa seseorang melakukan kecurangan: Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Dalam konteks koperasi, ketiadaan sistem yang kuat menciptakan "kesempatan" yang menjadi pintu masuk utama terjadinya *fraud*.

#### 2. *Stewardship Theory*

Teori ini memandang pengelola koperasi sebagai "pelayan" (*steward*) yang bertindak demi kepentingan anggota (prinsip ekonomi kerakyatan). Peran SPI dan SIA di sini adalah sebagai alat bagi pengelola untuk membuktikan integritas dan akuntabilitasnya.

#### 3. Kerangka Konseptual

##### Sistem Pengendalian Internal (SPI)

SPI bukan sekadar aturan, melainkan proses integral yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Dalam koperasi, SPI mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, serta pemantauan.

##### Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

SIA adalah komponen organisasi yang mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. SIA yang handal memastikan setiap transaksi terekam secara otomatis dan terlacak (*audit trail*).

**Literasi Pengelolaan Keuangan**

Literasi bukan hanya pemahaman angka, tetapi kemampuan pengurus dan anggota dalam memahami mekanisme keuangan, risiko, dan hak-hak pengawasan mereka di koperasi.

**Pengembangan Proposisi dan Hubungan Antar Variabel**

Bagian ini menjelaskan bagaimana masing-masing komponen berperan secara kualitatif dalam mencegah *fraud*:

**Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam *Fraud Prevention***

SPI bertindak sebagai benteng pertama (*first line of defense*). Dalam penelitian kualitatif, hubungan ini dilihat dari bagaimana prosedur otorisasi dan pemisahan fungsi membatasi ruang gerak pelaku *fraud*.

- **Proposisi:** Semakin kuat implementasi SPI (seperti adanya audit internal rutin), maka celah "Kesempatan" dalam *Fraud Triangle* dapat diminimalisir secara signifikan.

**Peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam *Fraud Prevention***

SIA berperan dalam menciptakan transparansi data secara real-time. Hubungan SIA dengan pencegahan *fraud* terletak pada kemampuannya menyediakan jejak digital yang tidak mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu.

- **Proposisi:** SIA yang terintegrasi memungkinkan deteksi dini (*early warning system*) terhadap anomali transaksi yang mengarah pada tindakan korupsi atau penggelapan dana koperasi.

**Peran Literasi Pengelolaan Keuangan dalam *Fraud Prevention***

Literasi keuangan berperan dalam aspek kognitif dan perilaku. Pengurus yang literasi keuangannya tinggi cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik, sementara anggota yang literat akan lebih kritis dalam mengawasi laporan keuangan koperasi.

- **Proposisi:** Literasi keuangan yang baik menekan faktor "Rasionalisasi" dalam kecurangan, karena individu memahami dampak jangka panjang hilangnya kepercayaan anggota akibat *fraud*.

**Kerangka Teoritis Sistematis**

Berdasarkan tinjauan di atas, berikut adalah alur logika penelitian ini:

Komponen	Mekanisme Pencegahan Fraud	Fokus Peran (Kualitatif)
SPI	Pengawasan & Pemisahan Tugas	Memperketat disiplin operasional dan kepatuhan.
SIA	Akurasi Data & Jejak Audit	Menghilangkan asimetri informasi antara pengurus dan anggota.
Literasi	Kesadaran & Etika Keuangan	Membangun budaya organisasi yang antikorupsi dan kritis.

**Sintesis Penelitian**

Penelitian ini memposisikan bahwa pencegahan *fraud* pada koperasi di Jakarta Utara tidak bisa hanya mengandalkan sistem teknis (SIA) atau aturan formal (SPI), melainkan harus didukung oleh kualitas manusia yang memahami keuangan (Literasi). Ketiganya membentuk sinergi pengawasan yang holistik untuk menjaga marwah koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kepercayaan.

**Peran Edukasi dalam Pencegahan Fraud**

Edukasi literasi keuangan dan kepatuhan administratif merupakan salah satu pendekatan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui edukasi ini, pengurus koperasi diharapkan tidak hanya memahami konsep dasar pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu menerapkan sistem pencatatan, pelaporan, serta pengendalian internal secara tepat guna meminimalisir risiko terjadinya *fraud*.

Selain itu, edukasi juga berperan dalam membentuk kesadaran etis (*ethical awareness*) dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana organisasi. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (2022), salah satu faktor utama terjadinya *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur keuangan yang benar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi menjadi langkah strategis dalam pencegahan *fraud*.

Lebih lanjut, literasi keuangan yang baik akan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, edukasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan koperasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis yang berfokus pada pengalaman subjektif 12 informan terkait penerapan pengendalian internal, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, serta tingkat literasi pengelolaan keuangan pada koperasi di Jakarta Utara.

**Informan Penelitian**

12 informan dipilih secara purposive, meliputi:

1. Pengurus koperasi (ketua, manajer)
2. Staf akuntansi dan keuangan
3. Staf pinjaman
4. Pengawas internal

**Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Tanya jawab semi-terstruktur.
2. Observasi: Mengamati langsung prosedur pencatatan harian di kantor koperasi, khususnya proses kas, pinjaman, dan pencatatan transaksi.
3. Dokumentasi: Memeriksa SOP, laporan keuangan, dan bukti transaksi dan rekam audit
4. Analisis Data: Menggunakan model Miles dan Huberman (Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan).

5. Uji Keabsahan Data: Triangulasi sumber (membandingkan pernyataan antara pengurus, pengawas, dan dokumen).

#### Analisis Data

Menggunakan model Miles & Huberman: Menggunakan model Miles dan Huberman (Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan).

1. Reduksi data
2. penyajian data
3. penarikan kesimpulan

Triangulasi data dilakukan melalui:

1. Triangulasi sumber (pengurus–staf–pengawas)
2. Triangulasi teknik (wawancara–observasi–dokumen)
3. Uji Keabsahan Data: Triangulasi sumber (membandingkan pernyataan antara pengurus, pengawas, dan dokumen).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun Sistem Pengendalian Internal telah dirancang secara formal, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini masih membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Beberapa temuan utama yang diperoleh antara lain:

1. Pemisahan tugas belum berjalan secara efektif
2. Pengawasan kas dan pinjaman masih terpusat pada satu pihak
3. Kebijakan yang ada belum disertai evaluasi rutin

Salah satu informan menyatakan: “SOP itu ada, tetapi dalam praktiknya sering tidak dijalankan secara konsisten karena menyesuaikan kondisi di lapangan.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal belum optimal. Hal ini sejalan dengan konsep Fraud Triangle, khususnya pada aspek opportunity, yang menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang terjadinya kecurangan.

### Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Mencegah Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Namun, masih terdapat koperasi yang belum memanfaatkan sistem secara optimal. Beberapa temuan yang diperoleh antara lain:

1. Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual
2. Belum adanya audit trail dalam pencatatan transaksi
3. Sistem yang digunakan belum terintegrasi secara menyeluruh

Sebaliknya, pada koperasi yang telah menggunakan sistem berbasis digital, ditemukan beberapa keunggulan, yaitu:

1. Data transaksi tercatat secara otomatis dan lebih akurat
2. Tersedia jejak aktivitas (audit trail)
3. Proses otorisasi menjadi lebih terkontrol

Salah satu informan menyatakan: “Setelah menggunakan aplikasi, setiap perubahan data dapat terdeteksi sehingga lebih aman dibandingkan sistem manual.”

Dengan demikian, penerapan SIA dapat mempersempit peluang terjadinya fraud, khususnya dalam mengurangi kesempatan (opportunity) untuk melakukan manipulasi data.

### Peran Literasi Pengelolaan Keuangan dalam Pencegahan Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi pengelolaan keuangan pengurus koperasi masih bervariasi. Sebagian pengurus belum memiliki pemahaman yang memadai dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan.

Kondisi ini berdampak pada:

1. Rendahnya kemampuan mendeteksi kejangalan dalam laporan keuangan
2. Pengambilan keputusan yang kurang tepat
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem tanpa pemahaman yang cukup

Sebaliknya, pengurus yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung mampu:

1. Mengidentifikasi potensi kecurangan sejak dini
2. Memahami kondisi keuangan organisasi secara lebih menyeluruh
3. Mengambil keputusan yang lebih rasional dan tepat

Salah satu informan menyatakan: “Masih ada pengurus yang kurang memahami laporan keuangan, sehingga hanya menyetujui tanpa melakukan analisis terlebih dahulu.”

Dengan demikian, literasi pengelolaan keuangan berperan sebagai bentuk pengendalian preventif dalam mencegah terjadinya fraud, karena mampu meningkatkan kemampuan analisis dan kewaspadaan terhadap risiko penyimpangan.

### Integrasi Sistem Pengendalian Internal, SIA, dan Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga faktor yaitu Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan literasi pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan yang erat dalam mempengaruhi tingkat risiko terjadinya fraud.

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai dasar pengawasan, SIA sebagai alat pendukung berbasis teknologi, dan literasi keuangan sebagai kemampuan individu dalam memahami serta mengawasi pengelolaan keuangan.

Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, apabila ketiganya berjalan secara optimal dan saling mendukung, maka potensi terjadinya fraud dapat diminimalisir.

Dengan demikian, pencegahan fraud tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui integrasi antara sistem, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia, sistem, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia.

## PEMBAHASAN

### Sinergi Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal pada koperasi di Jakarta Utara belum berjalan secara optimal, sehingga peluang terjadinya fraud masih relatif terbuka. Namun demikian,

keberadaan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi terbukti mampu mempersempit peluang kecurangan melalui peningkatan akurasi pencatatan, transparansi data, serta mekanisme audit trail. Selain itu, literasi pengelolaan keuangan pengurus berperan sebagai prasyarat utama agar sistem pengendalian dan teknologi dapat diawasi serta dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, pencegahan fraud menuntut adanya sinergi antara ketegasan prosedur, modernisasi sistem, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### Efektivitas SPI dalam Menekan Kesempatan Fraud

Hasil wawancara mengungkap bahwa koperasi yang menerapkan SOP pemisahan fungsi antara bagian kasir, pencatatan, dan otorisasi memiliki tingkat keamanan aset yang lebih tinggi.

Dukungan Penelitian Terdahulu: Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyadi (2016) yang menyatakan bahwa unsur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas merupakan kunci pengendalian. Begitu pula penelitian Putra et al. (2020) yang menemukan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* karena memperkecil peluang (*opportunity*) dalam *Fraud Triangle*.

### Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Memitigasi Peluang *Fraud*

Berdasarkan temuan di lapangan, SPI pada koperasi di Jakarta Utara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai mekanisme deteksi dini.

Peneliti menemukan bahwa kegagalan SPI seringkali bukan karena ketersediaan SOP, melainkan karena fenomena "Sungkanisme" (budaya ewuh pakewuh) yang masih kuat di lingkungan koperasi. Meskipun pemisahan fungsi secara formal ada, kedekatan personal antar pengurus seringkali melonggarkan pengawasan tersebut.

Perbandingan Penelitian Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas SPI di organisasi nirlaba sangat bergantung pada budaya organisasi. Namun, hasil ini memberikan nuansa berbeda dari penelitian Pratama (2021) yang hanya menekankan pada aspek teknis; dalam penelitian ini, aspek integritas manusia terbukti lebih dominan daripada sekadar dokumen fisik.

### Digitalisasi sebagai Instrumen Transparansi

SIA bukan sekadar alat hitung, melainkan alat deteksi dini. Di koperasi yang sudah terintegrasi secara digital, peluang manipulasi laporan (seperti *lapping* atau *skimming*) berkurang drastis. Pembahasan menyoroti bahwa SIA mempersempit Segitiga Fraud (*Fraud Triangle*), terutama pada aspek "Kesempatan" (*Opportunity*).



Penggunaan SIA berbasis aplikasi (digital) secara signifikan mengurangi risiko manipulasi data transaksi dibandingkan sistem manual. Analisis peneliti menunjukkan bahwa SIA berperan sebagai *digital watchdog*. Ketika data transaksi dapat diakses secara *real-time* oleh badan pengawas, ruang gerak untuk melakukan "rasionalisasi" atas penggunaan dana pribadi menjadi tertutup.

Perbandingan Penelitian: Hal ini mendukung teori *Stewardship* yang diajukan oleh Donaldson & Davis, di mana transparansi melalui sistem (SIA) memaksa pengurus bertindak demi kepentingan anggota. Dibandingkan dengan penelitian Wijaya (2023) yang melihat SIA hanya dari sisi efisiensi, penelitian ini menegaskan bahwa SIA adalah instrumen akuntabilitas moral.

### Literasi Keuangan sebagai Benteng Terakhir

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengendalian preventif dalam mencegah terjadinya fraud. Informan dengan tingkat literasi keuangan yang lebih baik terbukti mampu mengidentifikasi indikasi awal kecurangan (*red flags*) secara lebih cepat dibandingkan pengurus yang hanya mengandalkan sistem berbasis teknologi. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan menyebabkan efektivitas sistem pengendalian internal menjadi terbatas, karena pengawas tidak memiliki kemampuan analitis yang memadai untuk menilai kewajaran informasi keuangan.

### Literasi Keuangan sebagai Kontrol Preventif SDM

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa penguasaan terhadap rasio keuangan dan analisis arus kas memberikan kemampuan bagi pengurus koperasi untuk mengenali ketidakwajaran dalam laporan keuangan sebelum potensi kerugian berkembang lebih besar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Wahyuni (2022) menemukan adanya hubungan positif antara literasi keuangan pengurus koperasi dan integritas pelaporan keuangan, yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menekan kecenderungan terjadinya kecurangan.

Peneliti mencatat adanya korelasi kualitatif yang unik: semakin tinggi pemahaman anggota terhadap hak-hak keuangan mereka, semakin rendah keberanian pengurus untuk melakukan kecurangan. Literasi keuangan di sini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Tanpa literasi, SPI dan SIA semodern apapun akan tetap memiliki celah karena tidak ada yang mampu mengaudit hasilnya secara kritis dari sisi anggota. Perbandingan Penelitian Temuan ini memperkuat penelitian Chen et al. (2020) yang menyatakan literasi keuangan adalah faktor preventif utama dalam kejahatan kerah putih. Namun, dalam konteks Jakarta Utara, literasi ini masih bersifat parsial—hanya dipahami oleh pengurus inti, sehingga menciptakan *power imbalance* (ketidakseimbangan kekuasaan) yang masih berisiko memicu *fraud*.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada koperasi di

Jakarta Utara belum berjalan secara optimal, sehingga masih membuka peluang terjadinya fraud. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemisahan tugas, kurangnya pengawasan, serta belum konsistennya pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan fraud. Koperasi yang telah menggunakan sistem berbasis digital menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan melalui pencatatan yang akurat, adanya audit trail, serta mekanisme otorisasi yang lebih terkontrol, sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi data.

Selain itu, literasi pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting dalam mencegah fraud. Pengurus yang memiliki pemahaman keuangan yang baik lebih mampu membaca laporan keuangan, mendeteksi kejanggalan, serta mengambil keputusan yang tepat. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan.

Dengan demikian, pencegahan fraud pada koperasi memerlukan sinergi antara penerapan SPI yang efektif, pemanfaatan SIA yang memadai, serta peningkatan literasi pengelolaan keuangan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara lebih optimal dan akuntabel.

## SARAN

Koperasi disarankan untuk menerapkan Sistem Informasi Akuntansi berbasis digital yang dilengkapi dengan fitur audit trail dan otorisasi berlapis.

1. Perlu dilakukan pelatihan secara berkala terkait literasi keuangan, integritas, dan etika profesi bagi pengurus koperasi.
2. Evaluasi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal perlu dilakukan secara rutin agar prosedur yang telah ditetapkan dapat berjalan secara konsisten.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian terkait budaya organisasi serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi potensi fraud secara lebih mendalam.

## REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse.
- Farida Fitriani, D. S., & P, F. (2019). Effect of Internal Accounting and Control Information Systems on Employee Performance (Case Study of PT Beton Elemen Persada). *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*.
- Manurung, T. H. D., & Hadian, N. (2013). Detecting Fraud of Financial Statement with Fraud Triangle. 23rd International Business Research Conference. <https://doi.org/10.1080/03772063.1998.11416025>
- Moeller, R. R. (2012). *COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Myas, F., Aria, S., & Aria, E. (2025). Analisis Determinan Fraud dalam Distribusi Bantuan Sosial: Perspektif Fraud Triangle. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(01), 33–47. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.702>

- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- Priatiningsih, & Sari. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(2), 101. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i2.6248>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson.
- Sari, F. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Batang. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(2), 145. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i2.6533>
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 3(1), 27–42.
- Vaswani, M. (1997). Fraud and Financial Crime in Small Businesses. *Journal of Financial Crime*, 5(1), 39–44.